

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL  
(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung)**

**DRAFT SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam  
Menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada  
Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama



**Disusun Oleh :**

**Nama : Muhammad Edwin Kadafi**

**NPM : 01.07.335**

**Terakreditasi (Accredited)**

**SK Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)**

**Nomor : 014/BAN-PT/AK-XII/SI/VI/2009**

**Tanggal 12 Juni 2009**

**Bandung**

**2013**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL**

**(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat  
dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada  
Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

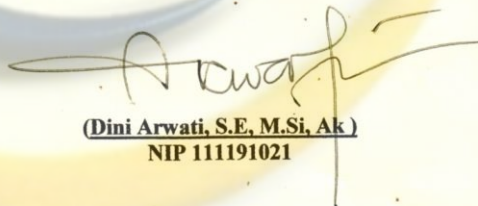
Disusun oleh :

Nama : Mochamad Edwin Khadafi

NPM : 0107335

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

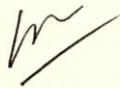


**(Dini Arwati, S.E., M.Si., Ak.)**

**NIP 111191021**

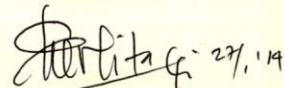
Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ekonomi**



**(Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak.)**  
**NIP 1110584003**

**Ketua Program Studi  
Akuntansi S1**



**(Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak.)**  
**NIP 1111199056**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL**

**(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat  
dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada  
Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

**Disusun oleh :**

**Nama : Mochamad Edwin Khadafi**

**NPM : 0107335**

**Menyetujui,**

**Dosen Pembimbing**

**(Dini Arwati, S.E, M.Si, Ak.)**

**NIP 111191021**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ekonomi**

**Ketua Program Studi  
Akuntansi S1**

**(Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak.)**  
**NIP 1110584003**

**(Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak.)**  
**NIP 1111199056**

**PENGARUH KARAKTERISTIK INFORMASI SISTEM AKUNTANSI  
MANAJEMEN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL**

(Survei Pada UMKM mitra PT. PLN)

**DRAFT SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat  
dalam menempuh ujian skripsi Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi  
pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

**Disusun oleh :**

**Nama : Wahyu Wicaksono Widiyoso**

**NPM : 0109U151**

**Menyetujui,**

**Dosen Pembimbing**

**(Intan Oviantari, S.E., M.S.Ak., Ak.)**

**NIP 1110201063**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Akuntansi S-1**

**(Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak.)**

**NIP 1111199056**

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN  
TERHADAP BELANJA MODAL

(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung)

**ABSTRACT**

*Regional Autonomy policy has brought about major changes in the patterns of local governance. Regional government are required to maximize the potential in administering government, because regional autonomy make regional governments have a more dominant role than before. In addition, local governments are required to have an actual development program, such as prioritize allocation of capital expenditure.*

*The purpose of this study is to determine the effect of local original income which are source of income native of local government and balancing fund that is transfer from the central government against capital spending in bandung.*

*Data of this research are secondary data that was taken from Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance Republic of Indonesia during nine period, between 2003 – 2011 In the form of a report the realization of budget income and regional spending and analyzed by multiple linear regression.*

*F test showed that local revenue and balancing fund simultaneously influence allocating capital spending significantly. Then, t test showed us that local own source revenue and balancing fund significantly influence on capital spending. This result are still need the further confirmation for trhe next research, because the lack of this research.*

**Keyword : local own source revenue, local original income, balancing fund, capital spending.**

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN  
TERHADAP BELANJA MODAL

(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung)

ABSTRAK

Kebijakan Otonomi daerah telah membawa perubahan besar dalam pola pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih memaksimalkan potensinya dalam mengelola pemerintahan, karena dengan otonomi daerah ini pemerintah daerah memiliki peran yang lebih dominan dibanding sebelumnya. Salah satu isu penting dalam otonomi daerah ini adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanjanya. Selain itu pemerintah daerah dituntut untuk memiliki program pembangunan yang nyata terasa dimasyarakat, diantaranya dengan memprioritaskan alokasi belanja modal.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penghasilan asli dari pemerintah daerah dan dana perimbangan yang merupakan transfer dari pemerintah pusat terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung.

Data penelitian ini diambil selama sembilan periode, yaitu antara tahun 2003-2011. Data penelitian ini adalah data sekunder yaitu, data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan yaitu berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada periode 2003-2011. Model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.

Berdasarkan uji F, dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Selanjutnya, hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

**Kata kunci : pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt, Tuhan semesta alam. Atas karunia, rahman serta rahim-Nya. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan umat Islam di dunia, Rasulullah Saw. Atas segala perjuangannya, keridhoannya, serta kegigihannya memperjuangkan agama Islam. Oleh karenanya, penulis mengucapkan syukur yang tak terhingga karena telah diizinkan untuk menyelesaikan skripsi ini yang merupakan syarat untuk menempuh ujian komprehensif Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal”**.

Dalam penyusunannya, skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak baik dalam memberikan semangat, do'a, bimbingan, dukungan, dan bentuk bantuan lainnya yang begitu jelas terasa kepada penulis sejauh ini. Oleh karenanya, perkenankan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang begitu dalam dan begitu besar kepada:

1. Orangtua tercinta, ayahanda H. M. Wahidin dan ibunda Hj. Yoyom Romlah, terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang, pengertian, kesabaran, masukan, motivasi serta semua dukungan yang tak hentinya diberikan baik materil maupun moril, serta untuk semua doa yang senantiasa dipanjatkan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dini Arwaty, S.E, M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan banyak meluangkan waktunya dalam membimbing, membantu dan memberikan saran-saran yang berharga bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini

3. Istri tercinta, Laras Santoso yang telah memberikan begitu banyak pengorbanannya sebagai seorang pendamping hidup dengan penuh pengertian dan cintanya.
4. Anaku tercinta, Emir Muhammad El Fatih yang menjadi malaikat kecil dalam hidup saya. Melihatnya menjadi kebahagiaan yang melejitkan semangat dalam berjuang.
5. Adik-adik tersayang, Silvia Ratna Suminar, Safiratul Zakiah, Syifa Rahmah Fauziah, M. Rifki Fadhilah Mubarak serta Alifa Zahra Khairunnisa untuk kasih sayang, perhatian serta dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak., Selaku Ketua Yayasan Universitas Widyatama Bandung
7. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas Widyatama Bandung
8. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung
9. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung
10. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Universitas Widyatama Bandung
11. Ibu Intan Oviantari, S.E., M.Si., Ak., selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi S1 Universitas Widyatama Bandung
12. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., MM., selaku Dosen Wali Program Studi Akuntansi S1 Universitas Widyatama Bandung

13. Seluruh dosen Program Studi Akuntansi S1 Universitas Widyatama Bandung yang telah memberikan pengajarannya, telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan telah menjadi mentor penulis selama menjalani masa perkuliahan, terima kasih untuk segalanya.
14. Seluruh Staf Akademis, Staf Kemahasiswaan, Staf Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama berada di lingkungan universitas widyatama bandung
15. Teman-teman dan sahabat seperjuangan di Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung angkatan 2007, terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kasih sayang, canda tawa, serta keceriaan yang selalu diberikan setiap kali berkumpul. Yang tak pernah lelah memberikan ide, saran, serta bantuan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih.

Bandung, 28 November

2013

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Maksud Penelitian .....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Otonomi Daerah.....	8
2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	9
2.3 Pendapatan Asli Daerah.....	11
2.3.1 Pajak Daerah.....	12
2.3.2 Retribusi Daerah .....	14
2.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	14
2.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah .....	15
2.4 Dana Perimbangan.....	15
2.4.1 Dana Bagi Hasil.....	17
2.4.2 Dana Alokasi Umum .....	19
2.4.3 Dana Alokasi Khusus .....	21
2.5 Belanja Modal.....	22
2.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis .....	23

2.6.1 Kerangka Pemikiran .....	23
2.6.2 Hipotesis .....	26
<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....</b>	<b>1</b>
3.1 Objek Penelitian.....	27
3.2 Metode Penelitian .....	27
3.2.1 Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.2.2 Operasionalisasi Variabel .....	29
3.2.3 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis .....	31
3.2.4 Statistik Deskriptif.....	31
3.2.5 Uji Asumsi Klasik .....	31
3.2.6 Analisis Regresi.....	34
3.2.7 Pengujian Hipotesis .....	35
3.3 Penarikan Kesimpulan.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>1</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung .....	37
4.1.2 Analisis Dana Perimbangan Kota Bandung .....	38
4.1.3 Analisis Belanja Modal Kota Bandung .....	39
4.1.4 Hasil Pengujian Asumsi Klasik .....	41
4.1.5 Hasil Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis .....	47
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	52
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>.....</b>
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran .....	61

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Tabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005 - 2009
- Tabel 3.1 Tabel Operasionalisasi Variabel
- Tabel 4.1 Tabel PAD dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2003 - 2011
- Tabel 4.2 Tabel Dana Perimbangan dan Rasio terhadap Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2003 - 2011
- Tabel 4.3 Tabel Belanja Modal dan Rasio terhadap Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2003 – 2011
- Tabel 4.4 Tabel Uji Normalitas Kosmogorov – Smirnov Test
- Tabel 4.5 Tabel Koefisien Uji Multikolinieritas
- Tabel 4.6 Tabel Uji Auto Korelasi Durbin Watson
- Tabel 4.7 Tabel Persamaan Regresi
- Tabel 4.8 Tabel Uji t
- Tabel 4.9 Tabel Uji F Anova

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedasitas



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL**

(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung)

DRAFT SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Menempuh  
Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada  
Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

Disusun Oleh :

Nama : Muhamad Edwin Kadafi

NRP : 01.07. 335

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing,

(Dini Arwati, S.E., M.Si., Ak.)

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi S1

(Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak.)



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998, kondisi pemerintahan cenderung dinamis. Bermunculan terobosan baru dalam pola pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Termasuk yang berkaitan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bila sebelumnya pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan yang terbatas karena pola yang dianut adalah pola sentralisasi, maka semenjak diberlakukannya undang-undang no 22 tahun 1999 yang di revisi menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pola hubungan yang cenderung sentralisasi ini berubah pada pola desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengatur pemerintahan daerahnya.

Kebijakan desentralisasi yang selanjutnya lebih dikenal dengan kebijakan otonomi daerah ini lahir karena melihat perkembangan kondisi didalam negeri yang menunjukkan keinginan dari rakyat akan keterbukaan informasi publik dan kemandirian daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Selain itu kondisi dunia secara global pun mengindikasikan semakin kuatnya arus globalisasi yang tentunya menuntut adanya daya saing yang kuat antar tiap negara. Upaya penguatan daya saing negara secara umum dapat dicapai bila pemerintah daerahnya memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan potensi yang ada didaerah sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pembangunan

daerah. Maka dari itu tujuan program otonomi daerah sendiri adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing - masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Bastian 2006).

Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah lebih berhak dalam membuat kebijakan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Peningkatan hak dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahanya. Peningkatan tanggung jawab disini diantaranya adalah upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai program program yang dijalankannya. Karena memang peningkatan kemandirian pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan daerah yang semakin baik (Halim 2001:2).

Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerah tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya akan berimplikasi pada peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. Selain pendapatan asli

daerah, komponen pendapatan daerah berdasarkan kepada UU nomor 33 tahun 2004 pasal 10 yang menyatakan bahwa yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah bukan hanya pendapatan asli daerah, namun ada transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang di salurkan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerja pemerintahan. Komposisi belanja daerah ini juga harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kebutuhan fasilitas publik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintahan daerah. Apabila kepercayaan publik ini meningkat, maka tentunya dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan publik ini alokasi belanja daerah pun harus mengalami perubahan, bila sebelumnya lebih banyak digunakan dalam pos belanja aparatur, maka jika ingin meningkatkan pelayanan publik haruslah lebih memprioritaskan alokasi belanja modal. Perubahan alokasi belanja ini juga bertujuan agar adanya peningkatan fasilitas yang dapat menggairahkan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat yang tentunya akan semakin menumbuhkan investasi didaerah. Untuk meningkatkan faslilitas layanan publik ini, maka pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar dalam bentuk belanja modal pada APBD. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2002) dalam Fhini (2009)

yang menyatakan bahwa dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah harus semakin mendekati diri pada pelayanan dasar publik dengan memaksimalkan sumber pendapatan daerahnya untuk peningkatan fasilitas pelayanan publik. Oleh karena itu alokasi belanja modal memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Berkaitan dengan pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah, kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap APBD pemerintah Kota Bandung selama lima tahun yaitu tahun 2005 sampai dengan 2009 dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran**  
**2005 – 2009**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Total Pendapatan Daerah (Rp)</b>	<b>Rasio Kemandirian</b>
2005	225.596.438.613,00	1.123.097.156.370,00	20,09%
2006	253.882.919.542,87	1.397.711.614.415,87	18,16%
2007	287.249.534.044,93	1.685.638.878.892,93	17,04%
2008	314.627.155.412,30	2.018.841.349.189,30	15,58%
2009	360.152.627.690,00	2.402.466.979.752,00	14,99%

**Sumber: Laporan APBD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2005-2009 (data diolah kembali)**

Data pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 2005 sampai tahun 2009, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah rasionya cenderung menurun. Kuncoro (2004) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja daerah paling tinggi sebesar 20 % dari total pendapatan daerah. Fenomena ini tentunya bertolak belakang dengan kondisi ideal dari otonomi daerah dimana pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan daerah yang lebih mandiri. Rasio pendapatan asli daerah yang menurun

ini tentunya diimbangi dengan peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat atau dari pos pendapatan lainnya yang sah dalam memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah Kota Bandung. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Rachmayani (2010) yang menyatakan bahwa kebanyakan daerah memiliki penerimaan yang didominasi oleh sumbangan dan bantuan oleh pemerintah pusat. Melihat kontribusi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap APBD dari pemerintah Kota Bandung diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH”** (Studi kasus pada Pemerintahan Kota Bandung).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah yang akan dibahas dan diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Pemerintahan Kota Bandung
2. Seberapa besar pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah di Pemerintahan Kota Bandung
3. Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah di pemerintahan kota bandung

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang bagaimana pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah Kota Bandung.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Pemerintahan Kota Bandung
2. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah di Pemerintahan Kota Bandung
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah di pemerintahan kota bandung

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana pengaruh

Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam memenuhi belanja daerah di Kota Bandung. Dan juga sebagai masukan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kedepannya.

2. Bagi penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis berkaitan dengan penelitian akuntansi sektor publik.

3. Bagi pihak lain

Memperkaya penelitian-penelitian sejenis yang telah ada yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian-penelitian berikutnya.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Otonomi Daerah**

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling memiliki pengetahuan tentang permasalahan daerah adalah pemerintah daerahnya itu sendiri. Karenanya pemerintah pusat menerbitkan Undang-undang Nomor undang-undang no 22 tahun 1999 yang di revisi menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang berisikan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah ini menjadi langkah awal bagi pemerintah daerah dalam memiliki wewenang yang lebih luas mengatur jalannya roda pemerintahan sesuai dengan aspirasi daerahnya sendiri.

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, pengertian Otonomi Daerah dan Daerah Otonom adalah sebagai berikut :

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan”

“Daerah otonomi selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Berdasarkan pengertian diatas maka dengan otonomi daerah ini, pemerintah daerah mendapatkan peningkatan hak dan wewenang yang sejalan

dengan peningkatan tanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan daerah. Dengan peningkatan wewenang ini, pemerintah daerah diharapkan dapat membuat program kerja yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerahnya. Pemerintah daerah juga harus dapat menggali potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja atas program kerjanya.

## **2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Dalam melaksanakan segala sesuatu dibutuhkan perencanaan yang matang agar tujuan yang didambakan dapat terwujud sesuai harapan. Perencanaan ini berlaku untuk setiap aktifitas, terlebih bagi aktifitas besar dan menyangkut kepentingan orang banyak seperti pelaksanaan pemerintahan daerah. Diperlukan perencanaan yang matang agar tujuan pemerintah daerah untuk memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat dapat tercapai. Salah satu perencanaan yang digunakan pemerintah daerah adalah dibuatnya APBD. APBD adalah bagian dari perencanaan yang berkaitan dengan anggaran yang digunakan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adapun pengertian anggaran menurut M. Nafarin (2007;20)

“Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode”

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran yang mana dalam

pelaksanaannya harus direncanakan dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Adapun Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinyatakan dalam pasal 1 butir (17) :

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah”

Sedangkan menurut Yuwono, dkk (2005:92) mendefinisikan APBD sebagai suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh DPRD.

Definisi APBD menurut Halim (2001;159) adalah rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk satu periode anggaran.

Selain itu, menurut Tim Pengembangan Konten Akuntansi Sektor Publik Universitas Widyatama (2009;67)

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang menjadi batas maksimal untuk satu periode anggaran”.

Menurut Deddi Nordiawan, Iswahyuni Sondi dan Maulidah Rahmawati (2009:30) :

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan oleh peraturan daerah”.

Dari beberapa pengertian di atas jelas bahwa APBD haruslah disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan seksama dengan memperhatikan skala prioritas dan dalam pelaksanaannya harus mengacu pada sasaran dengan cara yang berdaya guna dan berhasil guna.

### **2.3 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan daerah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdiri dari beberapa sumber pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah. Menurut Halim (2007:96) pendapatan asli daerah adalah :

“Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 dalam pasal 1 Ayat 17, yang dimaksud dengan pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

“Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut sebagai PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang undangan”

Setiap daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menggali dan memaksimalkan sumber sumber pendapatan yang ada didaerahnya. Peningkatan PAD ini menjadi sangat penting dalam era otonomi daerah, karena

kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2007)

Adapun yang menjadi sumber pendapatan asli daerah berdasarkan kepada pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 terdiri dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

### **2.3.1 Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah, menurut Rochmat yang dikutip Mardiasmo (2002:1) pajak adalah :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasar pengertian diatas, pajak ini bersifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang dan juga pembayar pajak tidak dapat mendapatkan timbal balik secara langsung atas pajak yang telah dibayarkan.

Kewenangan pemerintah dalam memungut pajak kepada masyarakat ini sesuai dengan pengertian pajak daerah dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah yang menyatakan bahwa :

“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah ini terdiri dari beberapa jenis pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2. Jenis jenis pajak daerahnya yaitu :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor,
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
  - d. Pajak Air Permukaan,
  - e. Pajak Rokok,
2. Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari :
  - a. Pajak Hotel,
  - b. Pajak Restoran,
  - c. Pajak Hiburan,
  - d. Pajak Reklame,
  - e. Pajak Penerangan Jalan,
  - f. Pajak mineral bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir,
  - h. Pajak Air Tanah,
  - i. Pajak Sarang Burung Walet,
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

### **2.3.2 Retribusi Daerah**

Sumber pendapatan lainnya yang dapat dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Bila pajak daerah tidak memiliki hubungan timbal balik secara langsung terhadap pembayar pajak, maka retribusi daerah ini memiliki timbal balik langsung kepada pembayarnya. Hal ini sejalan dengan pengertian Retribusi Daerah dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah :

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”

Pendapatan retribusi daerah ini erat kaitannya dengan banyaknya pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan juga tingkat kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, karena semakin banyak pelayanan yang diberikan akan semakin banyak pembayaran retribusi kepada daerah (Saragih, 2005).

### **2.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan meliputi : bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba atas penyeteran modal/investasi kepada pihak ketiga.

### **2.3.4 Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah, meliputi : hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan dinas pertanian tanaman pangan, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, penerimaan lainnya.

### **2.4 Dana Perimbangan**

Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam program otonomi daerah ini tentunya meningkatkan tanggung jawab pengelolaan program pada pemerintah daerah, program kerja yang sebelumnya ada dalam kebijakan pemerintah pusat, kini didelegasikan secara langsung kepada pemerintah daerah. Hal ini tentunya berimplikasi kepada peningkatan kebutuhan anggaran pemerintah daerah dalam membiayai program kerja yang meningkat tersebut. Maka untuk menciptakan satu sistem yang adil dan proporsional diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Merujuk pada pengertian Dana perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Dana Perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional

(APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Peningkatan kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam era otonomi ini memang seharusnya di atasi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan yang ada didaerahnya. Akan tetapi, kebanyakan daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah sehingga mengandalkan dana perimbangan ini. Hal ini sejalan dengan tujuan lahirnya dana perimbangan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa tujuan Dana Perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Dalam pandangan teori ekonomi publik, fungsi ekonomi pemerintah terdiri dari tiga fungsi pokok, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif bila kewenangannya ada pada pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih tepat jika pelaksanaannya ada pada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ada didaerahnya. Maka dari itu pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Ambarita, 2010).

Perincian pendapatan yang termasuk kedalam dana perimbangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yakni dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) itu terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

#### **2.4.1 Dana Bagi Hasil**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 20, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana bagi hasil ini ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang banyak, akan mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar sesuai dengan kekayaan alam yang telah digali. Selain sumber daya alam, sumber dana bagi hasil ini juga didapat dari bagi hasil pajak.

Penerimaan pajak yang termasuk dalam komponen pendapatan bagi hasil sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah :

1. Penerimaan Pajak

- a. Pajak bumi dan bangunan (PBB)

Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Dana bagi hasil PBB untuk daerah sebesar 90% sebagaimana dimaksud diatas dibagi dengan rincian sebagai berikut

- 1) 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan
    - 2) 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan

3) 9% untuk biaya pemungutan

Selanjutnya 10% penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian pemerintah pusat sebagaimana pembagian diatas dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota
- 2) 3,5% dibagikan secara intensif kepada kabupaten dan/atau kota yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi untuk daerah dengan rincian

- 1) 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- 2) 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

Selanjutnya bagian pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21

Dana bagi hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian dari daerah adalah sebesar 20% dengan rincian

- 1) 60% untuk kabupaten/kota
- 2) 40% untuk provinsi

2. Penerimaan Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

a. Sektor kehutanan

Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk daerah.

b. Sektor Pertambangan Umum

Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh

persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

c. Sektor Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangannya 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk pemerintah dan 15,5% (lima belas setengah persen) untuk daerah.

d. Sektor Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangannya 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk pemerintah dan 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk daerah.

e. Sektor Perikanan

Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan perimbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

f. Sektor Pertambangan Panas Bumi

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbangannya 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

## 2.4.2 Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 21, yang merupakan bagian dari dana perimbangan diantaranya adalah dana alokasi umum yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa tidak semua daerah memiliki potensi pendanaan yang merata

antar daerah. bagi daerah yang memiliki sumber pendapatan asli daerah yang rendah tentunya akan tertinggal dibanding daerah yang memiliki sumber pendapatan yang tinggi. Karenanya Dana Alokasi Umum ini hadir untuk mengatasi eksenjangan tersebut agar terwujudnya pemerataan pembangunan yang sesuai dengan amanah konstitusi.

Berkaitan dengan prioritas penggunaan anggaran Dana alokasi Umum ini, pemerintah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan bahwa Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

Pengalokasian Dana Alokasi Umum kepada setiap daerah ini ditentukan oleh celah fiskal yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal satu daerah dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah tersebut. Dana Alokasi Umum yang telah ditetapkan kepada setiap daerah berdasarkan pertimbangan celah fiskal tadi akan disalurkan dengan pemindah bukuan dari rekening umum pemerintah pusat kepada rekening kas pemerintah daerah. Kontribusi Dana Alokasi Umum ini masih menjadi sumber pendapatan utama pemerintah daerah karena proporsi DAU terhadap pendapatan daerah masih tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah.

### **2.4.3 Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang menjadi sumber pendapatan Daerah berdasar UU Nomor 33 Tahun 2004. Berdasar Undang-undang tersebut, Dana Alokasi Khusus diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu.

Dana Alokasi Khusus ini dialokasikan untuk daerah daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah dibanding kemampuan fiskal daerah secara nasional. Penentuan penerimaan dana alokasi khusus ini diatur sesuai dengan kriteria penerima DAK yang terdapat dalam undang-undang. Sesuai dengan pengertiannya, dana alokasi khusus ini dialokasikan untuk mendanai kebutuhan program pemerintah daerah yang sejalan dengan kepentingan program nasional, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bagian dari pendapatan daerah merupakan suatu bentuk transfer pusat guna mendanai kewenangan yang telah desentralisasikan, yang juga sekaligus mengemban tugas untuk mendukung prioritas nasional (Lubis 2010: 28). Secara lebih rinci Yani (2008: 172) menyatakan, bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana yang menjadi prioritas nasional seperti di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

## 2.5 Belanja Modal

Menurut Halim (2001) Belanja modal adalah belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Dengan pengertian tersebut maka belanja modal akan menambah aset tetap pemerintah daerah sehingga perlu diperhatikan secara matang dalam pemenuhan belanja modal ini. Tentunya belanja modal harus sangat disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar kelak aset tetap yang bertambah tersebut tidak menjadi sia sia atau malah menambah beban keuangan pemerintah daerah karena peningkatan aset akan meningkatkan biaya pemeliharaan. Kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan daerah dalam menjalankan aktifitas pemerintahannya harus dimaksimalkan untuk semakin mendekatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menggunakan anggaran pendapatan untuk belanja modal secara proporsional agar tujuan dari otonomi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat tercapai.

Menurut Nordiawan (2006), belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tertentu. Alokasi belanja modal ini akan meningkatkan sarana penunjang aktifitas masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan aktifitas perekonomian masyarakat. Peningkatan perekonomian masyarakat ini lahir karena fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah dalam bentuk belanja modal dapat meningkatkan daya tarik investasi dari masyarakat. Sebagai bagian dari belanja daerah, belanja modal pada hakikatnya memiliki peranan yang penting dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah.

Mardiasmo (2002) dalam Andria (2009) yang menyatakan bahwa dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada pelayanan dasar publik dengan memaksimalkan sumber pendapatan daerahnya untuk peningkatan fasilitas pelayanan publik. Peningkatan fasilitas pelayanan publik ini tentunya dengan memberikan porsi belanja modal yang maksimal. Peningkatan belanja modal ini sebenarnya akan semakin memberikan peluang kepada pemerintah daerah dalam memenuhi indikator keberhasilan otonomi daerah dalam hal kemandirian keuangan daerah memenuhi kebutuhan belanjanya.

Belanja modal yang dilakukan pemerintah untuk membangun fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan atau perbaikan sarana transportasi tentunya akan langsung dirasakan masyarakat manfaatnya. Dan ketika masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan ini maka dengan sendirinya akan tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang akan mendorong masyarakat meningkatkan investasi yang pada akhirnya menjadi sumber pendapatan asli daerah. maka dari itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsinya lebih banyak untuk kebutuhan belanja rutin (Abimanyu, 2005).

Menurut undang-undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa belanja modal terbagi kedalam:

#### **1. Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

## **2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

## **3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

## **4. *Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan***

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

## **5. *Belanja Modal Fisik Lainnya***

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

## **2.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

### **2.6.1 Kerangka Pemikiran**

Kebijakan Otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengembangkan potensi yang ada didaerahnya. Peningkatan wewenang ini tentunya sejalan dengan meningkatnya beban pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Bila sebelumnya

pemerintah daerah hanya menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, yang dimana semua program pemerintahan disesuaikan dengan kebijakan nasional. Maka saat ini sebagian besar kewenangan dalam merencanakan program sampai pada pelaksanaannya ada pada pemerintah daerah. Maka dari itu disatu sisi, kebijakan otonomi ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam membuat program yang paling sesuai dengan kondisi daerahnya. Tapi disisi lain otonomi daerah ini juga menjadi tantangan atau bahkan peningkatan beban bagi pemerintah daerah karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan kesiapan yang matang dari pemerintah daerah.

Sejalan dengan peningkatan wewenang pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dan pelaksanaan roda pemerintahan, pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu meningkatkan sumber pendapatan asli daerah nya agar bisa membiayai kebutuhan belanja daerah secara mandiri. Karena memang salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah yang semakin tinggi dalam memenuhi kebutuhan belanjanya.

Realitas yang ada menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20% (Kuncoro, 2007). Maka dari itu pemerintah pusat tidak berlepas tangan begitu saja dengan bergulirnya kebijakan otonomi daerah ini. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, pemerintah daerah mendapatkan porsi transfer dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Transfer dana dari pemerintah pusat ini diharapkan mampu membiayai belanja pemerintah daerah

dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berkaitan dengan belanja daerah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi ini, strategi alokasi belanja daerah menjadi penting untuk diperhatikan agar bisa berperan maksimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat menumbuhkan pendapatan asli daerah. Agar kontribusi publik terhadap pendapatan daerah dapat meningkat, hendaknya alokasi belanja modal yang merupakan bagian belanja daerah dapat ditingkatkan. Peningkatan belanja modal dalam pembangunan dan perbaikan sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi perlu untuk ditingkatkan agar masyarakat bisa langsung merasakan dampak dari pembangunan ini. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana publik tersebut tentu akan meningkatkan aktifitas usaha masyarakat di daerah sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

Alokasi belanja daerah itu sendiri tentunya dipengaruhi oleh pendapatan daerah. sebagaimana Von Furstenberg (1998) yang dikutip Sumarmi (2009) menyatakan dalam hipotesis penelitiannya bahwa penerimaan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah yang dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*. Sebagaimana dijelaskan bahwa desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah sangat diharapkan memiliki kemampuan menggali sumber-sumber keuangan lokal, yang khususnya melalui pendapatan asli daerah (Sidik, 2002). Tentunya apabila PAD

yang merupakan sumber pembelanjaan daerah mengalami peningkatan, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk alokasi belanja akan ikut meningkat, peningkatan itu diiringi dengan peningkatan kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Yang menjadi sumber anggaran dalam belanja daerah selain Pendapatan asli daerah adalah dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sehingga dana perimbangan ini memiliki keterkaitan dengan belanja daerah. Pernyataan tersebut berdasar kepada penelitian yang dilakukan Legrenzi dan Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2003) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan belanja modal. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmayani (2010) yang memberi kesimpulan dalam penelitiannya di pemerintah provinsi Jawa Barat bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

### **2.6.2 Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang akan disajikan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- H1: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal
- H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal
- H3 : Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal



## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah dalam APBD Pemerintah Kota Bandung pada kurun waktu 2005 sampai dengan 2010. Penelitian ini akan membahas bagaimana pengaruh dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pemerintah kota Bandung.

#### **3.2 Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono (2010:2), metode penelitian adalah :

“Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikasi. Menurut Nazir ( 2003 ) :

“Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.”

Sedangkan Menurut Marzuki ( 2003 ) :

“Metode yang menguji suatu pengetahuan. Tujuan dari penelitian verifikatif ini adalah di mana penulis melakukan pengujian hipotesis yang dianalisis dengan metode statistik, apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak.”

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa metode ini tidak hanya memberikan gambaran terhadap fenomena tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

### **3.2.1. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memenuhi kebutuhan data penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis terdiri dari :

#### **1. Penelitian Lapangan (field Research)**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Cara yang penulis gunakan untuk mendapatkan data sekunder ini adalah dengan dokumentasi, yaitu cara perolehan dokumen dokumen atau catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas Rachmayani (2010).

Data sekunder tersebut penulis dapatkan secara langsung dari dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah pemerintah Kota Bandung serta dari situs Departemen Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)), yaitu dalam bentuk laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Bandung. Dalam Laporan Realisasi APBD tersebut penulis mendapatkan data yang berkaitan dengan nilai Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Pemerintah Kota Bandung.

## 2. Penelitian Kepustakaan

Dalam pelaksanaan penelitian ini juga penulis melakukan penelusuran informasi dari literatur literatur untuk menambah wawasan dan informasi tentang masalah yang dikaji.

### 3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2010: 31) adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.”

Sedangkan pengertian Operasionalisasi Variabel Menurut menurut Nur Indriantoro (2007:69) sebagai berikut:

“Definisi operasional adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.”

Bedasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa agar penelitian yang dilakukan dapat diukur diperlukan operasionalisasi atas variabel yang akan diteliti, maka dari itu dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu :

#### a. Variabel Bebas ( *Independent Variable* )

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat), entah secara positif maupun negatif. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

**b. Variabel Terikat ( *dependent Variable*))**

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah belanja modal dalam APBD pemerintah Kota Bandung. .

Operasionalisasi atas variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 3.1 Operasionalisasi variabel**

Operasionalisasi Variabel	Indikator Variabel	Skala Pengukuran	Instrumen
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Pendapatan asli daerah meliputi : a. Hasil pajak daerah b. Hasil retribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	Rasio	Observasi
Dana Perimbangan (X2)	Dana Perimbangan meliputi : a. Dana Alokasi Umum b. Dana Alokasi Khusus c. Dana Bagi Hasil	Rasio	Observasi
Belanja Modal (Y)	Belanja Modal Meliputi a. Belanja Modal Tanah b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rasio	Observasi

### **3.2.3 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis**

Dalam melakukan penelitian ini metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah dengan analisis regresi linier berganda. Model regresi linier berganda dikatakan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik baik multikolinieritas, autokorelasi, dan heterokedasitas (Lubis, 2007: 45).

### **3.2.4 Statistik Deskriptif**

Menurut (Zulganef : 2008, 182) Statistik deskriptif adalah statistik yang menjelaskan bagaimana data atau sekumpulan data diklasifikasikan atau dikategorikan menjadi kelompok-kelompok data yang lebih mudah dianalisis atau dibaca oleh pengguna informasi berdasarkan data tersebut.

Statistik Deskriptif adalah metode yang berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data sehingga dapat memberikan informasi yang berguna berdasarkan keadaan yang umum. Statistik deskriptif memberikan penjelasan mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan nilai standar deviasi dari variabel-variabel independen dan dependen yang dijabarkan dalam bentuk statistik.

### **3.2.5 Uji Asumsi Klasik**

Salah satu syarat yang menjadi dasar penggunaan model regresi berganda adalah dipenuhinya semua asumsi klasik, agar hasil pengujian bersifat tidak bias dan efisien (*Best Linear Unbiased Estimator/BLUE*). Pengujian asumsi klasik

dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program statistik. Menurut Ghozali (2009: 123), asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah:

1. Berdistribusi normal,
2. *Non-multikolinearitas*, artinya antara variabel independen dalam model regresi tidak memiliki korelasi atau hubungan secara sempurna ataupun mendekati sempurna,
3. *non-Autokorelasi*, artinya kesalahan pengganggu dalam model regresi tidak saling korelasi,
4. homoskedasitas, artinya *variance variabel independen* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain adalah konstan atau sama.

#### **a) Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *P-P Plot Test*. Pengujian normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal. Dasar pengambilan keputusannya adalah :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

## b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara melihat Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Menurut model ini suatu model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas apabila mempunyai nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Nilai VIF ditentukan dengan rumus :

$$VIF = \frac{1}{Tolerance}$$

## c) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Ghazali (2005 : 95) menyatakan bahwa “uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya)”. Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data *time series*. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi, dapat dilakukan dengan metode grafik dan uji Durbin-Watson. Kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi yaitu:

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
2. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka D-W diatas +2 berarti autokorelasi negatif.

#### d) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan grafik *scatterplot* antara nilai variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID), dimana sumbu X adalah yang diprediksi dan sumbu Y adalah residual. Dasar pengambilan keputusan yang diambil adalah sebagai berikut :

- 1 Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2 Jika tidak ada yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 3.2.6 Analisis Regresi

Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja modal Di Kota Bandung, penulis menggunakan metode analisis regresi ganda. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X1 dan X2 ). Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2$$

Sumber: Sugiyono (2010:192)

### 3.2.7 Pengujian Hipotesis

#### 1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

#### 2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F merupakan pengujian secara bersama-sama pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel. Apabila nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel, maka variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebas. Kesimpulan ini dapat juga dilihat dari nilai signifikansi F-hitung. Bila signifikansinya lebih tinggi daripada tingkat keyakinan ( $\alpha = 0,05$ ) maka seluruh variabel independen tidak punya pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependennya, begitupun sebaliknya. Bila signifikansinya lebih kecil daripada tingkat keyakinan ( $\alpha = 0,05$ ) maka

seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependennya.

### **3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependennya. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistik dengan nilai t-tabel. Apabila nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel, maka variabel bebas tersebut secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebas. Kesimpulan ini dapat juga dilihat dari nilai signifikansi t-statistik atau t-hitung. Bila signifikansinya lebih tinggi daripada tingkat keyakinan ( $\alpha = 0,05$ ) maka variabel tersebut tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya, begitupun sebaliknya. Bila signifikansinya lebih kecil daripada tingkat keyakinan ( $\alpha = 0,05$ ) maka variabel tersebut punya pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya. Tingkat signifikansi 0,05 artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.

#### **3.2.8 Penarikan Kesimpulan**

Dari hipotesis yang penulis kemukakan dan dilakukan pengujian secara statistik, maka kelak dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh variabel independen baik secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal, diperoleh data dan informasi sebagai berikut :

##### 4.1.1 Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan kemandirian lokal yang menjadi bagian dari semangat program desentralisasi . Kemandirian fiskal ini diartikan sebagai semangat dalam membangun daerah dengan mengoptimalkan potensi penerimaan asli daerah dan mengurangi ketergantungan dari dana pihak luar. Data Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung tahun 2003 sampai dengan 2011 adalah sebagai berikut

**Tabel 4.1**

**PAD dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2003 – 2011**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Total Pendapatan Daerah (Rp)</b>	<b>Rasio Kemandirian</b>
2003	114.983.790.000	961.568.770.000,00	11,96%
2004	133.554.990.000	1.118.761.650.000,00	11,94%
2005	225.596.438.613,00	1.123.097.156.370,00	20,09%
2006	253.882.919.542,87	1.397.711.614.415,87	18,16%
2007	287.249.534.044,93	1.685.638.878.892,93	17,04%
2008	314.627.155.412,30	2.018.841.349.189,30	15,58%

2009	360.152.627.690,00	2.402.466.979.752,00	14,99%
2010	441.863.068.294	2.440.160.360.714	18,11%
2011	833.254.175.288	3.115.296.523.905	26,75%

**Sumber: Laporan APBD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2003-2011 (data diolah kembali)**

Berdasarkan data diatas, trend nilai pendapatan asli daerah dari tahun 2003 – 2011 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah terendah ada pada tahun anggaran 2003 dengan nilai Rp. 114.983.790.000 dan pendapatan asli daerah tertinggi terdapat pada tahun 2011 sebesar Rp. 833.254.175.288 . Namun meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, rasio PAD terhadap total pendapatan daerah cenderung fluktuatif. Pada tahun 2005 rasio kemandirian PAD meningkat menjadi 20,09 % dari 11,94 % pada tahun sebelumnya. Akan tetapi secara berturut turut dari tahun 2006 sampai dengan 2009 rasio PAD terhadap total pendapatan asli daerah mengalami penurunan dan baru kembali menguat pada tahun 2010 dan 2011 dimana pada tahun 2011 merupakan rasio kemandirian paling tinggi dengan nilai 26,75 %.

#### **4.1.2 Analisis Dana Perimbangan Kota Bandung**

Dana perimbangan yang merupakan bagian dari pendapatan daerah ini memiliki peranan yang dominan dalam memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah Kota Bandung. Kebutuhan pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan roda pemerintahannya masih memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Data Dana Perimbangan yang diperoleh dari Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung tahun 2003 sampai dengan 2011 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Dana Perimbangan dan Rasio terhadap Pendapatan Daerah Kota**  
**Bandung Tahun Anggaran 2003 – 2011**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>Rasio terhadap pendapatan daerah</b>
2003	Rp 622.457.510.000	Rp. 961.568.770.000	64,73%
2004	Rp 831.751.880.000	Rp. 1.118.761.650.000	74,35%
2005	Rp 685.900.870.000	Rp 1.123.097.156.370	61,07%
2006	Rp 866.476.380.000	Rp 1.397.711.614.416	61,99%
2007	Rp 1.097.176.115.472	Rp 1.685.638.878.893	65,09%
2008	Rp 1.360.460.067.955	Rp 2.018.841.349.189	67,39%
2009	Rp 1.448.863.491.100	Rp 2.402.466.979.752	60,31%
2010	Rp 1.459.244.804.313	Rp 2.440.160.360.714	59,80%
2011	Rp 1.406.734.260.136	Rp. 3.115.296.523.905	45,16%

**Sumber: Laporan APBD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2003-2011 (data diolah kembali)**

Berdasarkan data diatas, dana perimbangan dari pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dalam memenuhi total pendapatan daerah Kota Bandung. Nilai dana perimbangan dari tahun 2003 sampai 2010 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan baru pada tahun 2011 mengalami penurunan. Dan perimbangan paling rendah terdapat pada tahun 2003 dengan nilai Rp 622.457.510.000 dan paling tinggi pada tahun 2010 dengan nilai Rp 1.459.244.804.313.

#### **4.1.3 Analisis Belanja Modal Kota Bandung**

Kebutuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahannya diperlihatkan pada pos belanja dalam APBD. Salah satu pos belanja yang sering menjadi sorotan adalah pos belanja modal. Belanja modal ini berkaitan dengan peningkatan fasilitas pelayanan publik dalam bentuk infrastruktur dan juga hal

lainnya yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun anggaran. Nilai belanja modal pemerintah Kota Bandung pada periode 2003 – 2011 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Belanja Modal dan Rasio terhadap Belanja Daerah Kota Bandung Tahun**  
**Anggaran 2003 – 2011**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Modal (BeM)</b>	<b>Belanja Daerah (BD)</b>	<b>Rasio BeM terhadap BD</b>
2003	53.926.870.000,00	945.824.120.000,00	5,70%
2004	51.749.030.000,00	975.023.710.000,00	5,31%
2005	136.746.540.000	1.096.592.281.568	12,47%
2006	81.316.010.000	1.266.047.202.038	6,42%
2007	232.007.682.250	1.552.886.614.168	14,94%
2008	345.160.822.373	2.058.920.582.038	16,76%
2009	390.988.308.073	2.240.739.995.151	17,45%
2010	405.699.482.843	2.522.680.816.553	16,08%
2011	612.081.890.549	3.080.347.679.003	19,87%

**Sumber: Laporan APBD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2003-2011 (data diolah kembali)**

Berdasarkan data diatas, nilai belanja modal dari tahun 2003-2011 cenderung fluktuatif. Alokasi belanja modal tertinggi terdapat pada tahun 2011 dan nilai alokasi belanja modal terendah ada pada tahun 2004 yang alokasinya turun bila dibandingkan alokasi belanja modal tahun 2003. Namun dari tahun 2007 alokasi belanja modal mengalami peningkatan yang cukup besar yakni dari Rp. 81.316.010.000 pada tahun 2006 menjadi Rp. 232.007.682.250 pada tahun 2007. Peningkatan alokasi belanja modal ini terus berlanjut hingga anggaran 2011. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah kota bandung semakin memperhatikan alokasi belanja modal yang memang harus menjadi prioritas dalam upaya pembangunan daerah.

#### 4.1.4 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

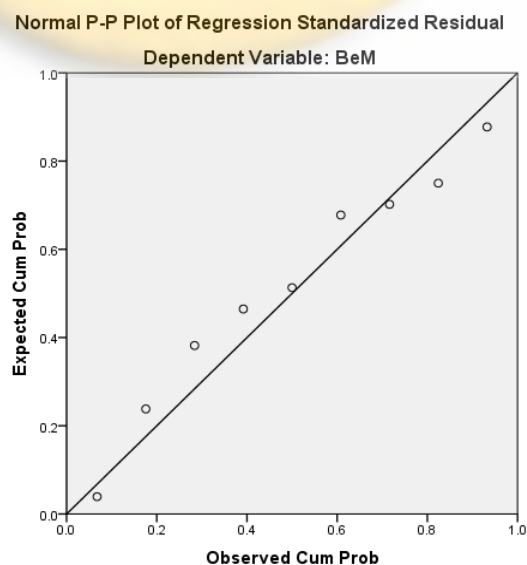
##### 1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Erlina, 2008). Untuk menguji apakah data penelitian ini terdistribusi normal atau tidak dapat dideteksi melalui dua cara yaitu analisis grafik dan analisis statistik :

###### a. Analisis Grafik

Analisis grafik dapat digunakan dengan dua alat, yaitu grafik histogram dan grafik P-P Plot. Data yang baik adalah data yang memiliki pola distribusi normal. Pada grafik P-P Plot, sebuah data dikatakan berdistribusi normal apabila titik-titik datanya tidak menceng ke kiri atau ke kanan, melainkan menyebar di sekitar garis diagonal.

Gambar 4.1  
Uji Normalitas



Pada grafik P-Plot diatas dapat dilihat persebaran data ada pada sekitar garis diagonal. Grafik ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

### b. Analisis Statistik

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual antara lain adalah uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dapat dilakukan dengan membuat hipotesis:

Ho : Data residual berdistribusi normal

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal

Untuk menentukannya maka kriterianya adalah:

- Ho diterima apabila nilai signifikansi  $> 0,05$
- Ha ditolak apabila nilai signifikansin  $< 0,05$

**Table 4.2**  
**Kosmogorov – Smirnov Test**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		PAD	DP	BeM
N		9	9	9
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	329462,7443	1086562,8198	255063,5507
	Std. Deviation	215135,17465	342251,02740	196569,70132
Most Extreme Differences	Absolute	,221	,233	,171
	Positive	,221	,184	,171
	Negative	-,159	-,233	-,137
Kolmogorov-Smirnov Z		,663	,698	,512
Asymp. Sig. (2-tailed)		,771	,715	,955

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari hasil uji statistik terlihat pada Tabel 4.2. nilai Kosmogorov-Smirnov Z untuk PAD sebesar 0,663 dan signifikansinya pada 0,771, untuk Dana Perimbangan dengan nilai 0,698 dan nilai signifikansinya pada 0,715 , dan nilai Kosmogorov-Smirnov Z untuk belanja modal sebesar 0,512 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,955. dengan demikian bisa diketahui bahwa nilai Asymp. Signifikan nya diatas 0,05 yang berarti data residual berdistribusi normal.

## 2. Hasil Uji Multikolonieritas

Untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen maka pada penelitian ini dilakukan Uji multikolinieritas. Menurut Ghazali, 2005:91 “model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya”. Untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas dapat dilakukan dengan cara menggunakan variance inflation factor (VIF) dan nilai tolerance. Multikolinieritas terjadi jika VIF lebih dari 10 dan nilai tolerance lebih kecil dari 0,10. Berikut disajikan tabel hasil pengujian:

4.3. Tabel Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 PAD	,498	2,010
DP	,498	2,010

a. Dependent Variable: BeM

Berdasarkan table 4.3 diatas, nilai tolerance menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,10 yaitu untuk variabel PAD adalah 0,498 dan variabel Dana Perimbangan adalah 0, 498. Sementara itu, seluruh variabel

independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PAD dan dana perimbangan memiliki angka variance inflation factor (VIF) lebih kecil dari 10, PAD memiliki angka VIF 2,010 begipun dengan dana perimbangan yang memiliki angka VIF 2,010. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam variabel independennya.

### 3. Hasil Uji Auto Korelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu dalam model regresi atau dengan kata lain error dari observasi tahun berjalan dipengaruhi oleh error dari observasi tahun sebelumnya. Pada pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi. Kriteria dalam menentukan autokorelasi dengan uji durbin – Watson ini adalah sebagai berikut :

Deteksi Autokorelasi Positif:

- Jika  $d < d_L$  maka terdapat autokorelasi positif,
- Jika  $d > d_U$  maka tidak terdapat autokorelasi positif,
- Jika  $d_L < d < d_U$  maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.

Deteksi Autokorelasi Negatif:

- Jika  $(4 - d) < d_L$  maka terdapat autokorelasi negatif,

- Jika  $(4 - d) > dU$  maka tidak terdapat autokorelasi negatif,
- Jika  $dL < (4 - d) < dU$  maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.

Hasil pengujian yang baik adalah ketika menunjukkan tidak adanya autokorelasi baik itu secara positif maupun negatif. Dan berikut nilai Durbin-Watson yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi.

**Tabel 4.4 Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.982a	.964	.951	52175,24936	2,443

a. Predictors: (Constant), DaPer, PAD

b. Dependent Variable: BeM

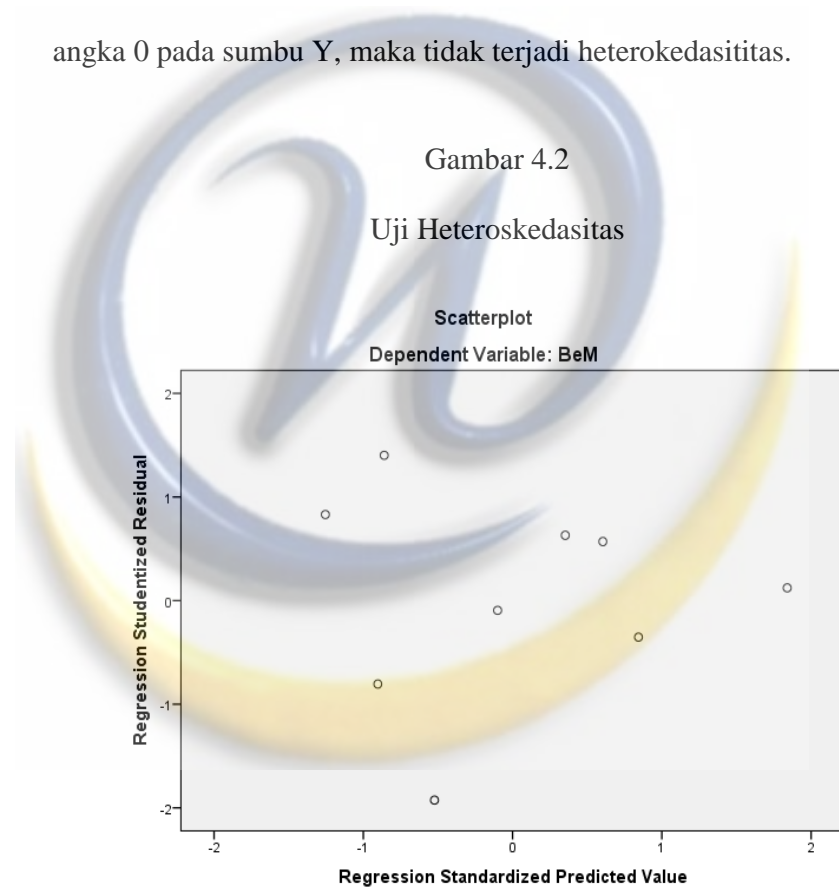
Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai statistik Durbin-Watson ( $D-W$ ) = 2,443, sementara dari tabel d pada tingkat kekeliruan 5% untuk jumlah variabel = 3 dan jumlah pengamatan  $n = 9$  diperoleh batas bawah nilai tabel ( $dL$ ) = 0.8242 dan batas atasnya ( $dU$ ) = 1.31988. Karena nilai Durbin-Watson model regresi (2,443) berada diantara  $dU$  (1,31988) dan  $4-dU$  (2,680), yaitu daerah tidak ada autokorelasi sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi.

#### 4. Hasil Uji Heterokedastitas

Uji heterokedastitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi telah terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2005:105). Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut

Homokedasititas dan jika berbeda disebut Heterokedasititas. Beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedasititas:

- 1 Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang menyebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedasititas.
- 2 Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedasititas.



Grafik scatterplots pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur, hasil ini mengindikasikan tidak terjadi heterokedastisitas. Oleh karena itu, model

regresi layak dipakai untuk memprediksi pengalokasian anggaran belanja modal berdasarkan masukan variabel independen PAD dan dana perimbangan.

#### 4.1.5 Hasil Analisis Regresi dan pengujian hipotesis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi berganda sebagai alat analisis. Setelah dilakukan uji asumsi klasik sebagai syarat memenuhi layaknya analisis regresi, maka selanjutnya dilakukan analisis regresi berganda. Pengolahan data dengan menggunakan regresi linear dilakukan dalam beberapa tahapan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen atau kriteria dapat diprediksikan melalui variabel independen atau prediktor, secara individual. Dampak dari penggunaan analisis regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui menaikkan dan menurunkan keadaan variabel independen atau sebaliknya.

##### 1. Persamaan Regresi

Berikut hasil analisis regresi yang ditampilkan dalam tabel 4.5

**Tabel 4.5 Persamaan Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	1 (Constant)	-221189,333	50560,267				-4,375
DP	,278	,060	,484	4,596	,004	,498	2,010
PAD	,529	,096	,579	5,506	,002	,498	2,010

a. Dependent Variable: BeM

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi diatas maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$BM = -221189,333 + 0,529 \text{ PAD} + 0,278 \text{ DP}$$

Keterangan:

1. Konstanta sebesar -221189,333 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen (PAD, DP) maka tingkat pengalokasian anggaran belanja modal sebesar -221189,333
2. Koefisien regresi pendapatan asli daerah (X1) = 0,529 menunjukkan bahwa setiap penambahan pendapatan asli daerah sebesar 1%, dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan, maka akan menaikkan tingkat pengalokasian anggaran belanja modal sebesar 0, 529.
3. Koefisien regresi dana perimbangan (X2) = 0, 278 menunjukkan bahwa setiap penambahan dana perimbangan sebesar 1% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan, maka akan meningkatkan tingkat pengalokasian anggaran belanja modal sebesar 0,278.

## **2. Analisis Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2005:83). Besarnya  $R^2$  diantara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ). Jika nilainya semakin mendekati satu maka model tersebut baik dan tingkat kedekatan antara variabel bebas dan variabel terikat pun semakin dekat pula. Kelemahan mendasar dalam penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen. Semakin banyak variabel independen ditambahkan ke dalam

model maka R<sup>2</sup> akan meningkat walaupun variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap model.

Tabel 4.4 menunjukkan nilai koefisien (R) sebesar 0,98 atau 98% yang berarti hubungan (relation) antara pengalokasian anggaran belanja modal dengan variabel independennya yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sangat erat. Angka adjusted R Square sebesar 0,951 berarti 95,1% faktor-faktor pengalokasian anggaran belanja modal dapat dijelaskan oleh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Sedangkan selebihnya 4,9 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini.

### 3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji t. Berikut adalah tabel hasil pengolahan datanya:

Tabel 4.6 Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-221189,333	50560,267		-4,375	,005		
DP	,278	,060	,484	4,596	,004	,498	2,010
PAD	,529	,096	,579	5,506	,002	,498	2,010

a. Dependent Variable: BeM

Uji parsial pertama dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah secara parsial terhadap belanja modal. Diduga pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung, karena itu peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho : Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung

Ha1 : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung

Sebagaimana terlihat pada tabel 4.7 diperoleh nilai t hitung variabel pendapatan asli daerah sebesar 5,506 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2,447 yang diperoleh dari tabel t pada  $\alpha = 0.05$  dan derajat bebas 6 untuk pengujian dua pihak. Karena nilai thitung (5,506) lebih besar dari ttabel (2,447) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho1 sehingga Ha1 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung.

#### **4. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal**

Uji parsial selanjutnya dilakukan untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan secara parsial terhadap alokasi belanja modal pemerintah Kota Bandung. Dalam penelitian ini diduga dana perimbangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah Kota Bandung, karena itu peneliti menetapkan

hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho : Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung

Ha1 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung

Nilai  $t_{hitung}$  variabel dana perimbangan pada tabel 4.6 menunjukkan nilai sebesar 4,596 dan nilai  $t_{tabel}$  pada  $\alpha = 0,05$  dan derajat kebebasan 6 adalah sebesar 2,447. Dengan demikian nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  dan juga nilai signifikansi sebesar 0,002 yang berada dibawah 0,05 sehingga bisa dinyatakan bahwa Ho ditolak yang berarti Ha1 diterima yang berarti dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Bandung.

## 5. Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dapat dihitung dengan menggunakan uji F. Dari hasil pengolahan data, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7 ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	298897156594,219	2	149448578297,109	87,739	.000 <sup>b</sup>
Residual	10220023210,342	6	1703337201,724		
Total	309117179804,561	8			

a. Dependent Variable: BeM

b. Predictors: (Constant), PAD, DP

Hasil uji ANOVA atau *F-test* pada tabel 4.7 menunjukkan  $F_{hitung}$  sebesar 87,739 dengan tingkat signifikansi 0,000 sedangkan  $F_{tabel}$  adalah 5,143 dengan tingkat signifikansi 0,05 sehingga  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $87,739 > 5,143$ ) ; tingkat signifikansi penelitian  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

## **4.2 Pembahasan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal, maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut :

### **4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011, nilai pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan. Peningkatan paling tinggi yaitu pada tahun 2011. Pada 2010 nilai pendapatan asli daerahnya sebesar 441.863.068.294 dan pada tahun 2011 melonjak menjadi 833.254.175.288, berdasarkan hasil pengamatan di dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah, peningkatan itu didukung oleh peralihan pengurusan pajak biaya perolehan hak tanah dan bangunan yang pada awalnya disetor ke pemerintah pusat dan sejak tahun 2011 beralih menjadi dikelola langsung oleh pemerintah daerah Kota Bandung. Selain dari peralihan pengelolaan BPHTB, kenaikan pendapatan asli daerah juga tidak lepas dari peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber sumber

pendapatan asli daerah. Nilai belanja modal pun mengalami trend peningkatan setiap tahunnya meskipun ada pada tahun 2006 yang mengalami penurunan. Belanja modal tertinggi ada pada tahun 2011 yang juga meningkat dari nilai belanja tahun 2010 sebesar 405.699.482.843 dan menjadi 612.081.890.549 pada tahun 2011. Peningkatan alokasi belanja modal ini menjadi penting karena dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang tentunya dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat akan semakin membangun kepercayaan publik kepada pemerintah. Dan kepercayaan publik yang terbangun dengan baik tersebut akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.

Melihat nilai pendapatan asli daerah dan belanja modal yang cenderung meningkat setiap tahunnya ini, maka muncul ketertarikan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap nilai belanja modal. Terlebih pendapatan asli daerah ini seharusnya memiliki peranan yang dominan dalam memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah. Selain itu bila melihat peningkatan PAD dari 2010 yang sebesar 441.863.068.294 menjadi 833.254.175.288 pada tahun 2011 ini sejalan dengan peningkatan belanja modal pada tahun 2010 sebesar 405.699.482.843 dan menjadi 612.081.890.549 pada tahun 2011. Berdasarkan hasil uji parsial yang dilakukan, diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hasil ini didapat dengan melihat nilai  $t$  hitung 5,506 yang lebih besar dari nilai  $t$  table 2,447.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Pangabean (2009) yang meneliti pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di kabupaten

toba samosir yang berkesimpulan bahwa PAD memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal akan tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Putro (2011) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Menurut Romario (2012) Perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh PAD terhadap alokasi belanja modal ini menggambarkan bahwa potensi dan sumber daya yang berbeda-beda yang dimiliki daerah-daerah di Indonesia sehingga tidak semua daerah di Indonesia dapat mengandalkan pendapatan asli daerahnya untuk menentukan besarnya alokasi anggaran belanja modal. Komponen PAD yang memiliki nilai terbesar yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil ini dapat dilihat dari sumbangan pajak daerah secara rata-rata sejak tahun 2003 sampai dengan 2011 yang menyumbang 74,2 % dari nilai total pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun pun memiliki trend yang meningkat nilainya, hal ini didukung oleh kebijakan anggaran yang semakin memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menggali potensi daerahnya, diantaranya adalah kebijakan anggaran yang mengalihkan pajak BPHTB kepada pemerintah daerah secara langsung pada tahun anggaran 2011. Sehingga pada tahun 2011 nilai PAD mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Dan pada tahun 2014 yang akan datang, pajak bumi dan bangunan pun akan dialihkan secara langsung kepada pemerintah daerah yang tentunya akan semakin meningkatkan nilai pendapatan asli daerah. Bila melihat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap alokasi belanja modal, maka peningkatan nilai

pendapatan asli daerah pada setiap tahunnya tentu akan semakin meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah. Sehingga alokasi dana perimbangan dalam bentuk dana alokasi umum yang biasa dialokasikan untuk menutupi ketimpangan anggaran pemerintah daerah akan semakin berkurang dan itu tentunya merupakan perkembangan positif yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang semakin baik kedepannya.

#### **4.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dana perimbangan masih memiliki peranan yang dominan dalam memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah. kondisi ini terlihat dari proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah yang lebih besar dibandingkan proporsi pendapatan asli daerah. Persentase alokasi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah dari tahun 2003 sampai dengan 2009 secara berturut turut sebesar 64,73 % ; 74,35 % ; 61,07% ; 61,99% ; 65,09% ; 67,39% ; 60,31 % ; 59,80 % ; 45,16%. Nilai dana perimbangan tertinggi ada pada tahun 2010 sebesar Rp. 1459.244.804.313 . Tentunya kondisi tersebut tidak sejalan dengan semangat kemandirian dalam program otonomi daerah. Maka untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk semakin optimal dalam menggali potensi pendapatan asli daerah. Selain itu upaya peningkatan kemandirian ini juga ditopang dengan kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kewenangan pengambilan pajak BPHTB yang pada awalnya dikelola pusat menjadi dikelola daerah. dampak kebijakan tersebut dapat terlihat alokasi dana perimbangan tahun 2011. Meskipun alokasi dana perimbangan terus mengalami peningkatan dari

tahun 2003 sampai 2010, dana perimbangan mengalami penurunan pada tahun 2011 yang pada 2010 sebesar Rp. 1459.244.804.313 menjadi Rp. 1.406.734.260.136 pada tahun 2011. Sebagai bagian dari pendapatan daerah yang menjadi andalan dalam memenuhi belanja daerah, maka penulis meneliti ada tidaknya pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal, dan berdasar uji parsial terhadap dana perimbangan yang telah dilakukan diketahui bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ambarita (2010) yang menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hasil ini didapat dengan melihat nilai t hitung 4,506 yang lebih besar dari nilai t table 2,447. Lebih besarnya nilai t hitung dibandingkan dengan t tabel ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal. Adanya pengaruh yang besar dari dana perimbangan terhadap belanja modal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota Bandung masih memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam mengalokasikan belanja modal. Dalam penelitian Andari (2011) rasio kemandirian pemerintah kota Bandung pada kurun waktu 2005 sampai dengan 2009 memang mengalami penurunan, meskipun secara nominal mengalami peningkatan akan tetapi peningkatan PAD tersebut diimbangi juga dengan peningkatan nominal dana perimbangan dari pemerintah pusat sehingga bila dilihat dari rasio kemandirian kondisinya cenderung menurun. Rasio kemandirian Pemerintah Kota Bandung mulai mengalami peningkatan pada tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2011 rasio kemandirian meningkat menjadi 26,7 %

yang menunjukkan nilai kemandirian yang masuk dalam kategori sedang bila merujuk kepada standar departemen dalam negeri. Melihat adanya pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal ini, maka pemerintah daerah harus semakin meningkatkan upaya penggalan sumber pendanaan asli daerah agar alokasi belanja modal bisa lebih maksimal dengan menggunakan pendapatan asli daerah.

#### **4.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal**

Nilai belanja modal dalam periode penelitian ini memiliki trend yang fluktuatif, akan tetapi memiliki kecenderungan yang lebih baik dalam lima tahun terakhir yaitu sejak tahun 2007 hingga tahun 2011. Bila pada tahun 2006 sempat mengalami penurunan dengan nilai belanja modal 81.316.010.000, tapi sejak tahun 2007 terjadi lonjakan nilai belanja modal yang signifikan menjadi 232.007.682.250 atau meningkat sebesar 285 % . Dan peningkatan belanja modal ini terus terjaga hingga tahun 2011 yang merupakan pencapaian alokasi belanja modal tertinggi sebesar 612.081.890.549. Peningkatan alokasi belanja modal ini tentunya selain didukung kebijakan kepala daerah yang semakin memprioritaskan alokasi belanja modal juga didukung oleh peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah. karena tentunya paket kebijakan peningkatan alokasi belanja modal ini tidak akan dapat berjalan jika pemasukan kas daerah tidak mengalami peningkatan. Penjelasan ini didukung dengan fakta yang memang menunjukkan peningkatan pemasukan daerah dari setiap tahunnya.

Pendapatan asli daerah yang merupakan bagian dari sumber pemasukan daerah sejak tahun 2003 sampai dengan 2011 terus mengalami peningkatan, pendapatan asli daerah terendah ada pada tahun 2003 dengan nilai Rp 114.983.790.000 dan terus meningkat dari tahun ketahunnya sehingga memiliki nilai tertinggi pada tahun 2011 sebesar Rp 833.254.175.288. Begitupun halnya dengan dana perimbangan yang terus mengalami peningkatan nilainya. Pada tahun 2003 sebesar Rp. 622.457.510.000 dan terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp 1.406.734.260.136. Berdasar kepada peningkatan dua sumber pemasukan utama kas daerah ini lah mengemuka hipotesis alternatif yang menyatakan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh secara simultan terhadap belanja modal.

Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan terhadap belanja modal dilakukan pengujian statistik dengan uji F sebagaimana dalam tabel 4.7. Dalam pengujian, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 87,739 dan nilai F hitung tersebut lebih besar dari f tabel yang sebesar 5,143. Karena nilai F hitung ini lebih besar dari F tabel dan dalam tabel 4.7 juga diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 maka dapat diketahui bahwa secara simultan Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Selain dari Uji F ini, hasil analisis koefisien determinasi pun menunjukkan nilai sebesar 0,951 yang berarti 95,1 % faktor pengalokasian belanja modal dapat dijelaskan oleh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Sedangkan selebihnya sebesar 4,9 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarni (2009) yang menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang merupakan bagian dari komponen dana perimbangan secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Dengan semakin kuatnya pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal ini, maka pemerintah daerah harus semakin memaksimalkan peningkatan pendapatan asli daerah dengan terus menggali sumber sumber pendapatan asli daerah yang belum digali secara maksimal serta senantiasa meningkatkan kualitas kontrol atas pemungutan sumber pendapatan asli daerah agar pendapatan asli daerah dapat meningkat dan dapat meningkatkan alokasi belanja modal. Selain itu peningkatan pendapatan asli daerah juga dapat menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang semakin baik.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal pada pemerintah kota Bandung, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis regresi memperlihatkan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal terdapat hubungan yang berbanding lurus dimana apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan pada saat Dana perimbangan tidak mengalami perubahan, maka belanja Modal akan meningkat. Begitupun sebaliknya dengan dana perimbangan yang juga memiliki hubungan dengan belanja modal.
2. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di pemerintah Kota Bandung.
3. Dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di pemerintah Kota Bandung.
4. Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di pemerintah Kota Bandung.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk semakin menggali potensi PAD yang ada di Kota Bandung sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja modal dalam APBD Kota Bandung.
2. Bagi peneliti berikutnya dimasa mendatang untuk memperluas dan memperbanyak sampel penelitian seperti pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat serta memperbaharui periode pengamatan.
3. Bagi peneliti berikutnya untuk menambah variabel-variabel yang mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Salatiga : Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Ambarita, Charles, 2009. *Pengaruh Dana Perimbangan Dan Fiscal Stress Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*, Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU, Medan.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Deddi, Nordiawan Putra, Iswahyudi Sondi dan Rahmawati, Maulidah. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Fhini, Andrea. 2009. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia Salatiga* : Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Halim, Abdul, 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN,
- \_\_\_\_\_, 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN,
- \_\_\_\_\_, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat.
- Harianto, David. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita*. Salatiga. Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana.

- Lubis, Indra Syahputra, 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provisnsi Sumatera Utara*, Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU, Medan.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Panggabean, Edison, Hendri, 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir*, Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU, Medan.
- Putro, Nugroho Suratno, 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia, *Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Belanja Daerah*, Departemen Dalam Negeri.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
- Sastradipraja, Usman. 2010. *Analisis dan Penggunaan Laporan Keuangan*. Bandung : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Widayatama

Saragih, Juli Panglima. 2005. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Sumarmi, Saptianingsih. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah*.  
Jurnal. Universitas PGRI.Yogyakarta

Yani, Ahmad. 2005. *Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers.

Yuwono, Sony, dkk.2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Surabaya. Bayumedia  
Publising.

